



KUASA BAHASA KESEPULUH FIRMAN: SUATU ANALISIS WACANA HISTORIS TERHADAP KELUARAN 20:1-17

Richo Preshart Christian Wenas¹, Mariam Lidia Mytty Pandean²,
Maya Pingkan Warouw³

^{1,2,3}Universitas Sam Ratulangi, Manado

¹richopchwenas@gmail.com, ²mariampandean@unsrat.ac.id,

³maya_warouw@unsrat.ac.id

Abstract

This article examines the Ten Commandments (Ex. 20:1-17) through Ruth Wodak's Discourse-Historical Approach. The aim is to explore how divine authority is constructed linguistically and theologically, and how language functions in shaping the moral and spiritual order of the community. The method applied is qualitative, based on literature study. The findings show that the Ten Commandments is not merely ethical but also serves as a discursive instrument to build social structure, legitimize divine power, and affirm Israel's identity. The analysis of structure and linguistic strategies highlights the role of language in shaping norms and authority. This study contributes new insights to biblical theology through a critical linguistic perspective. Practically, the Ten Commandments remain relevant to ethics in Indonesia, particularly in resisting corruption, intolerance, abuse of power, and consumerism, while promoting integrity, solidarity, and social justice.

Keywords: Ten Commandments; Exodus 20:1-17; Discourse-Historical Approach; divine authority; linguistic theology; critical discourse analysis

Abstrak

Artikel ini mengkaji Kesepuluh Firman (Kel. 20:1-17) dengan pendekatan Analisis Wacana Historis Ruth Wodak. Tujuannya adalah melihat bagaimana otoritas Ilahi dikonstruksi secara linguistik dan teologis, serta bagaimana bahasa berperan dalam membentuk tatanan moral dan spiritual umat. Metode yang digunakan adalah kualitatif berbasis studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesepuluh Firman tidak hanya bersifat etis, tetapi juga menjadi instrumen wacana untuk membangun struktur sosial, melegitimasi kuasa Ilahi, dan meneguhkan identitas Israel. Analisis struktur dan strategi bahasa menegaskan fungsi bahasa sebagai sarana pembentukan norma dan otoritas. Temuan ini memberi kontribusi baru bagi kajian teologi biblika melalui perspektif linguistik kritis. Secara praktis, Kesepuluh Firman relevan bagi etika di Indonesia, terutama dalam menolak korupsi, intoleransi, penyalahgunaan kuasa, dan budaya konsumtif, sekaligus mendorong integritas, solidaritas, dan keadilan sosial.

Kata Kunci: Kesepuluh Firman; Keluaran 20:1-17; Analisis Wacana Historis; otoritas Ilahi; teologi linguistik; analisis wacana kritis

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan instrumen fundamental dalam pembentukan realitas sosial dan relasi kuasa dalam masyarakat. Dalam kerangka analisis wacana kritis, bahasa dipahami bukan hanya sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai sarana ideologis yang membentuk kesadaran, mengatur perilaku kolektif, dan memperkuat struktur sosial yang telah mapan (Fairclough, 1995; van Dijk, 1998). Pemikiran ini menjadi sangat relevan ketika diterapkan dalam analisis terhadap teks-teks keagamaan, yang memiliki otoritas tinggi dalam mengatur kehidupan spiritual, moral, dan sosial umat beriman. Salah satu teks yang memiliki pengaruh besar dalam tradisi Kekristenan adalah Kesepuluh Firman (Kel. 20:1-17), yang secara historis diyakini sebagai firman langsung dari Tuhan kepada bangsa Israel.

Kajian-kajian sebelumnya terhadap Kesepuluh Firman umumnya dilakukan dari perspektif teologi sistematik, tafsir biblika, dan etika Kristen. Brueggemann menekankan pentingnya aspek etis dan simbolik dari Kesepuluh Firman dalam membentuk identitas kolektif

Israel (Brueggemann, 2003). Childs melihatnya sebagai teks normatif dalam konteks pembentukan komunitas pasca-eksodus (Childs, 1976). Namun, pendekatan-pendekatan tersebut cenderung menitikberatkan pada isi teologis tanpa banyak menyoroti dimensi linguistik dan kekuasaan yang terkandung dalam teks tersebut. Dalam perkembangan mutakhir linguistik kritis, pendekatan seperti Analisis Wacana Historis (AWH) dari Ruth Wodak membuka ruang analisis baru terhadap teks keagamaan sebagai produk dan sarana kekuasaan dalam konteks sejarah dan ideologi (Wodak, 2015).

Penerapan pendekatan AWH dalam studi teks Kitab Suci belum banyak dilakukan dalam konteks Indonesia, khususnya terhadap Kesepuluh Firman. Padahal, pendekatan ini sangat potensial dalam menyingkap bagaimana bahasa dalam teks tersebut digunakan untuk membentuk struktur sosial, melegitimasi kekuasaan ilahi, dan membentuk identitas kolektif umat. Oleh karena itu, artikel ini mengisi kekosongan dalam literatur dengan mengkaji Kesepuluh Firman melalui

pendekatan linguistik kritis, bukan hanya dari sisi teologis.

Kebaruan ilmiah (*novelty*) dari kajian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis linguistik (AWH) dan refleksi teologis terhadap Keluaran 20:1-17. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan isi Firman, tetapi menelaah bagaimana struktur bahasa yang digunakan oleh Tuhan menciptakan relasi kekuasaan, norma sosial, dan identitas kolektif umat Israel. Ini menjadi kontribusi baru dalam ranah teologi biblika yang dikaji melalui perspektif linguistik kritis.

Permasalahan penelitian ini difokuskan pada: (1) bagaimana struktur wacana dalam Kesepuluh Firman mencerminkan hubungan kuasa antara Tuhan dan umat Israel, dan (2) bagaimana strategi diskursif dalam teks tersebut memengaruhi pemahaman teologis dan sosial di masa kini.

Dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Historis (AWH), penelitian ini berusaha memperlihatkan bahwa teks tersebut tidak hanya berisi perintah moral, tetapi juga memuat strategi bahasa

yang mengonstruksi otoritas Allah, menata norma sosial, dan memperkuat identitas umat Israel sebagai komunitas perjanjian.

Penelitian ini juga bertujuan menghubungkan pesan Kesepuluh Firman dengan konteks kehidupan masa kini, khususnya dalam ruang etika publik di Indonesia. Bahasa pada dasarnya menjadi sarana yang membentuk ikatan sosial melalui interaksi dan proses saling memengaruhi di antara para penggunanya (Nasution, 2007).

Firman Allah dalam teks ini dipandang bukan hanya untuk kepentingan rohani semata, melainkan juga memiliki daya relevan dalam menghadapi persoalan sosial yang nyata, seperti praktik korupsi, intoleransi, penyalahgunaan kuasa, dan budaya konsumtif. Pada saat yang sama, Kesepuluh Firman dapat menjadi inspirasi untuk membangun sikap hidup yang lebih berintegritas, solider, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam

fenomena sosial dan kultural melalui proses interpretasi terhadap data non-numerik, terutama teks. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna yang tersembunyi di balik representasi bahasa, serta menangkap nuansa ideologis dan kontekstual yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka atau statistik. Sebagaimana dijelaskan oleh Subakti, penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berusaha memahami realitas sosial berdasarkan makna-makna subjektif yang dibentuk oleh individu atau kelompok dalam lingkungan tertentu. Penekanan utamanya terletak pada deskripsi naratif dan analisis kontekstual yang kaya, bukan pada generalisasi (Subakti et al., 2023).

Ciri utama dari penelitian ini adalah penggunaan Alkitab Terjemahan Baru Edisi I sebagai sumber informasi utama. Dalam konteks ini, teks Alkitab, khususnya Keluaran 20:1-17 dianalisis sebagaimana adanya, dalam konteks historis dan teologisnya. Data yang dikaji bersifat tekstual, bukan numerik. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data lebih bersandar pada dokumentasi, pembacaan kritis,

serta interpretasi terhadap teks-teks primer maupun sekunder.

Model penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur atau tinjauan pustaka. Studi ini dilakukan dengan cara menelusuri, mengklasifikasi, dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian, baik literatur teologi, linguistik, maupun teori kritis wacana. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga bersifat analitis dan evaluatif. Dengan kata lain, peneliti tidak hanya menyusun ringkasan dari sumber-sumber yang ada, tetapi juga membandingkan dan mengkritisnya secara konstruktif guna membangun landasan teoretik dan metodologis yang kuat.

Studi literatur dalam penelitian ini juga berfungsi sebagai kerangka hermeneutik dalam menafsirkan teks Kitab Suci. Metode ini sangat cocok untuk mendukung pendekatan Analisis Wacana Kritis Historis yang digunakan dalam penelitian ini, karena keduanya sama-sama mengutamakan pemahaman kontekstual dan interpretasi mendalam atas wacana. Analisis wacana bukan hanya terbatas pada masalah secara umum saja, namun

menunjukkan pengaruh kekuasaan dan narasi serta mengkaji keadaan sosial dan dampaknya (Ambarwati, 2022).

Keduanya saling melengkapi: hermeneutik membuka jalan interpretasi yang reflektif, dan Analisis Wacana Historis memberikan alat untuk memeriksa kaitan antara bahasa dan konteks sejarah secara rinci. Dengan begitu, pemahaman teks menjadi lebih lengkap dan kritis.

Analisis dalam teks ini didasarkan pada rumusan masalah mengenai struktur wacana dan strategi diskursif. Menurut Wodak (2015b), terdapat tiga dimensi dalam menganalisis struktur wacana, yaitu topik, strategi bahasa dan analisis kebahasaan sedangkan strategi diskursif mencakup nominasi, prediksi, argumentasi, *perpevtivization* dan *intensification*.

Data dikumpulkan secara sistematis, yakni teks Keluaran 20:1-17 sebagai sumber utama, beserta informasi konteks historis, sosial, budaya, dan teologis yang melingkupi teks tersebut. Dari keseluruhan data yang terkumpul, peneliti memilih unit analisis spesifik yang akan dikaji, misalnya ayat-ayat yang membentuk

struktur perintah, perangkat linguistik tertentu (kata, frasa, kalimat) yang menonjol, atau bagian naratif penting.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Kehidupan Umat Israel Berdasarkan Keluaran

Kitab Keluaran diawali dengan kisah penindasan bangsa Israel di Mesir, yang menyebabkan mereka kehilangan martabat dan kebebasan sosial. Situasi ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan penyelamatan, yang kemudian dijawab oleh Allah dengan memanggil Musa sebagai pemimpin pembebasan. Pembebasan ini bukan sekadar upaya politik, melainkan juga awal dari perjanjian baru antara Tuhan dan umat-Nya.

Dalam pasal 5 sampai 12, tercatat konflik antara Musa dan Firaun yang berakhir dengan sepuluh tulah sebagai tanda kekuasaan Allah atas para dewa Mesir. Setelah peristiwa Eksodus, perjalanan bangsa Israel di padang gurun diwarnai dengan dinamika ketaatan dan pemberontakan, yang mencerminkan proses pembentukan spiritual dan sosial mereka.

Kunjungan Yitro, mertua Musa, dalam pasal 18 menunjukkan kebutuhan akan struktur hukum dan organisasi dalam komunitas yang mulai terbentuk. Ketika sampai di Gunung Sinai pada pasal 19, bangsa Israel mengalami transisi dari perbudakan menuju kemerdekaan, namun belum memiliki norma atau aturan yang jelas.

Karena itu, Kesepuluh Firman pada pasal 20 hadir sebagai konstitusi spiritual yang tidak sekadar berisi aturan moral biasa, tetapi merupakan wahyu ilahi yang mengikat dan membentuk perjanjian eksklusif antara Tuhan dan umat-Nya. Allah mempersiapkan umat-Nya secara sakral untuk menerima titah ini, menegaskan bahwa hukum-hukum tersebut memiliki kekudusan dan otoritas mutlak.

Dengan demikian, Keluaran 1-19 menyediakan kerangka sejarah dan spiritual yang vital bagi pemahaman isi Dekalog. Kesepuluh Firman tidak dapat dilepaskan dari konteks penindasan, pembebasan, dan transformasi kolektif Israel. Hukum Allah muncul bukan di ruang hampa, tetapi sebagai landasan etis dan identitas kolektif bagi bangsa yang telah ditebus. Maka, analisis

linguistik dan diskursif terhadap pasal 20 harus memperhitungkan seluruh dinamika ini agar pemaknaannya utuh dan kontekstual.

Penelitian ini mengungkap bahwa Kesepuluh Firman dalam Keluaran 20:1-17 bukan hanya merupakan kumpulan hukum moral, melainkan wacana kekuasaan yang sarat dengan dimensi ideologis, linguistik, dan teologis. Dengan menerapkan model Analisis Wacana Historis dari Ruth Wodak, ditemukan tiga lapisan utama dalam teks: struktur topik yang sistematis, strategi diskursif yang mempertegas otoritas ilahi, dan perangkat linguistik yang menegaskan relasi kuasa serta identitas kolektif umat.

Struktur Topik dan Relasi Kuasa Dalam Teks

Struktur wacana dalam Keluaran 20:1-17 memperlihatkan susunan sistematis yang membentuk kerangka moral, sosial, dan spiritual bagi bangsa Israel. Teks ini diawali dengan prolog teologis dan historis yang memperkenalkan identitas Allah sebagai pembebas, kemudian dilanjutkan dengan sepuluh perintah yang disampaikan dalam bentuk imperatif. Pola penyusunan ini

memperlihatkan konstruksi relasi kuasa yang jelas antara Tuhan sebagai sumber otoritas ilahi dan umat Israel sebagai komunitas yang tunduk pada otoritas tersebut.

Ayat pertama dan kedua (“Akulah TUHAN, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan”) menjadi fondasi dari keseluruhan perintah. Dalam perspektif wacana, bagian ini berfungsi sebagai strategi legitimasi yang mengacu pada narasi sejarah pembebasan untuk menegaskan otoritas yang dimiliki Tuhan (Wodak, 2015a). Dalam konteks sejarah Israel, pengalaman eksodus merupakan titik balik pembentukan identitas kolektif, di mana Tuhan bertindak sebagai aktor historis yang membebaskan dan sekaligus sebagai legislator ilahi (Childs, 1976). Melalui penggunaan pronomina personal “Aku” dan “engkau”, relasi kuasa dikonstruksikan secara langsung dan bersifat vertikal.

Perintah pertama (“Jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku”) menyatakan tuntutan monoteisme eksklusif. Dalam konteks masyarakat Timur Dekat

Kuno yang politeistik, larangan ini tidak hanya bersifat religius, tetapi juga politis dan identitasional. Tuhan menuntut loyalitas total dari umat-Nya, tanpa ruang kompromi dengan bentuk spiritualitas lain (Brueggemann, 2003). Secara linguistik, bentuk negatif-imperatif yang digunakan mempertegas otoritas perintah dan sifat absolut dari tuntutan tersebut (Fairclough, 1995).

Perintah kedua melarang pembuatan dan penyembahan patung, serta menyertakan konsekuensi multigenerasional: “Aku, TUHAN, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan... tetapi menunjukkan kasih setia...”. Kalimat ini merupakan bentuk penguatan ideologi melalui strategi diskursif berbasis ancaman dan janji (Reisigl & Wodak, 2001). Secara teologis, ini menunjukkan bahwa penyembahan kepada Tuhan tidak dapat diwujudkan melalui representasi visual, melainkan melalui kepatuhan relasional. Dalam perspektif wacana historis, perintah ini sekaligus membedakan Israel dari praktik religius Mesir dan Kanaan yang memvisualisasikan ilah dalam bentuk

patung atau simbol material (Childs, 1976).

Perintah ketiga (“Jangan menyebut nama TUHAN, Allahmu, dengan sembarangan”) memperlihatkan dimensi kebahasaan yang sangat eksplisit. Penyebutan nama Tuhan tidak hanya dianggap sebagai tindakan verbal, tetapi sebagai tindakan performatif yang memiliki efek sosial dan spiritual (van Dijk, 1998). Dalam konteks Israel, nama Tuhan (YHWH) dianggap sakral dan tidak boleh digunakan dalam konteks profan. Larangan ini sekaligus mengatur batas antara yang kudus dan yang duniawi, antara ujaran yang membangun dan ujaran yang menistakan.

Perintah keempat, tentang menguduskan hari Sabat, memperkenalkan dimensi waktu sebagai bagian dari struktur sosial dan spiritual. Kata kerja “ingatlah” dan “kuduskanlah” menekankan tindakan aktif umat untuk menjadikan waktu sebagai ruang kudus. Strategi diskursif yang digunakan mengacu pada narasi penciptaan, di mana Tuhan sendiri beristirahat pada hari ketujuh. Ini menunjukkan bahwa perintah Sabat bukan hanya bersifat

ritual, tetapi juga merupakan bentuk persekutuan sosial dan penegasan ritme hidup komunitas (Brueggemann, 2003).

Dimensi horizontal dalam struktur wacana dimulai dari perintah kelima: “Hormatilah ayahmu dan ibumu”. Perintah ini menandai peralihan dari relasi teologis menuju relasi sosial. Dalam masyarakat patriarkal Israel, keluarga merupakan unit utama dalam pembentukan moral dan transmisi tradisi iman. Strategi diskursif yang digunakan adalah insentif (“supaya lanjut umurmu...”), yang menunjukkan nilai penghormatan sebagai kunci kelangsungan hidup komunitas (Wodak, 2015b).

Perintah-perintah keenam hingga kesepuluh mengatur relasi antarindividu: larangan membunuh, berzinah, mencuri, bersaksi dusta, dan mengingini milik sesama. Kelima perintah ini menggunakan struktur imperatif negatif yang ringkas dan mutlak. Dalam konteks linguistik wacana, bentuk ini disebut *low-modality command* yang tidak memberikan ruang untuk negosiasi atau interpretasi ganda (Fairclough, 1995). Misalnya, perintah “Jangan membunuh” dan “Jangan mencuri”

bukan hanya bersifat moral, tetapi juga merupakan deklarasi hukum yang mengatur keberlangsungan komunitas.

Perintah terakhir (“Jangan mengingini...”) menarik karena merupakan satu-satunya perintah yang menysar dimensi batiniah, bukan hanya tindakan lahiriah. Ini menunjukkan bahwa struktur kekuasaan ilahi tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga membentuk kesadaran dan kehendak internal umat. Dalam kerangka wacana historis, perintah ini membentuk etika preventif yang menegaskan pentingnya pengendalian diri untuk menjaga tatanan sosial (Reisigl & Wodak, 2001).

Seluruh struktur wacana Kesepuluh Firman mencerminkan tatanan sosial yang teokratis, di mana bahasa bukan hanya medium komunikasi, tetapi juga sarana pembentukan norma, identitas kolektif, dan otoritas. Perintah-perintah disusun tidak secara acak, melainkan dengan urutan yang menggambarkan prioritas teologis dan sosial. Pendekatan Analisis Wacana Historis mengungkap bahwa teks ini beroperasi dalam tiga lapisan

analisis: pertama, sebagai pernyataan historis dan ideologis; kedua, sebagai alat legitimasi kekuasaan ilahi; dan ketiga, sebagai sarana institusionalisasi norma dalam kehidupan komunitas iman (Wodak & Meyer, 2009).

Oleh sebab itu, struktur topik dan relasi kuasa dalam Keluaran 20:1-17 membuktikan bahwa teks Kitab Suci ini tidak hanya menyampaikan perintah moral, tetapi juga mengonstruksi kekuasaan, mengatur diskursus, dan membentuk dunia sosial umat Allah.

Strategi Diskursif: Legitimasi Otoritas Ilahi

Analisis Wacana Historis (AWH), sebagaimana dirumuskan oleh Ruth Wodak dan Michael Reisigl, menawarkan pendekatan sistematis dalam mengidentifikasi bagaimana teks berfungsi membentuk identitas, legitimasi, dan relasi kuasa dalam konteks sosial tertentu (Reisigl & Wodak, 2009). Dalam Keluaran 20:1-17, strategi-strategi ini muncul secara eksplisit sebagai wacana teologis yang digunakan untuk membangun struktur masyarakat dan otoritas ilahi.

Strategi Nominasi

Strategi nominasi tampak dalam penandaan entitas seperti “allah lain”, “patung”, atau “istri”. Kata-kata ini memuat muatan evaluatif yang menandai aktor atau objek sebagai sah (YHWH, orang tua) atau terlarang (dewa asing, patung). Proses ini sesuai dengan fungsi *othering* dalam wacana ideologis membedakan “kita” (umat Tuhan) dari “mereka” (penyembah berhala), suatu tindakan pembentukan identitas melalui eksklusi (Reisigl & Wodak, 2009; Zhumagulov et al., 2025).

Strategi Predikasi

Melalui strategi predikasi, Tuhan diposisikan sebagai “cemburu” dan “penunjuk kasih setia”, menampilkan citra afektif sekaligus otoritatif. Tindakan seperti membunuh, mencuri, dan berzina dipredikasi secara negatif sebagai kejahatan universal. Predikasi seperti ini tidak netral, tetapi sarat evaluasi moral dan simbolik yang memperkuat norma dominan (Li, 2025; Reisigl & Wodak, 2001).

Strategi Argumentasi

Ayat 2, yang menyatakan bahwa Tuhan telah membawa Israel keluar dari tanah Mesir, menjadi dasar argumentatif seluruh perintah berikutnya. Ini adalah *topos historis*, yakni penggunaan memori kolektif sebagai legitimasi norma sosial (Reisigl & Wodak, 2009). Dalam konteks biblikal, ini berfungsi sebagai fondasi otoritas: umat harus taat karena Tuhan adalah penyelamat mereka. Sebuah pendekatan yang sejalan dengan metode hermeneutik kontekstual untuk menafsirkan teks suci dalam kerangka sejarah dan komunitas (Maranatha, 2024).

Perspectivization, Framing dan Discourse Representation

Strategi *perspectivization*, *framing*, dan *discourse representation* merupakan elemen penting dalam pendekatan Analisis Wacana Historis dari Ruth Wodak. Ketiganya berfungsi mengungkap bagaimana suatu teks tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk pandangan dunia, legitimasi kekuasaan, serta identitas sosial dan ideologis. Dalam konteks artikel yang mengkaji Kesepuluh Firman (Keluaran 20:1-17), ketiga

strategi tersebut tampak menonjol dan diterapkan secara konsisten.

Strategi *perspectivization* dalam teks terlihat dari bagaimana Tuhan diposisikan sebagai aktor utama yang berbicara langsung kepada umat-Nya dengan otoritas absolut. Melalui penggunaan pronomina personal seperti "Aku" dan "engkau", wacana membangun hubungan yang sangat personal, namun pada saat yang sama bersifat hierarkis. Perspektif yang dihadirkan dalam teks tidaklah netral; ia mencerminkan sudut pandang teologis yang menempatkan Tuhan sebagai sumber kebenaran dan hukum, sedangkan umat berada dalam posisi tunduk dan wajib patuh. Hal ini memperlihatkan bagaimana posisi naratif dalam teks digunakan untuk memperkuat relasi kuasa yang vertikal dan tidak simetris.

Sementara itu, strategi framing digunakan untuk membingkai keseluruhan isi Dekalog dalam kerangka naratif yang mendukung otoritas ilahi. Teks dibuka dengan narasi pembebasan "Akulah TUHAN, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir" yang berfungsi sebagai landasan moral dan

historis bagi seluruh perintah yang menyusul. Pembingkai ini sangat penting karena mengaitkan kepatuhan terhadap hukum dengan pengalaman kolektif umat akan penyelamatan. Tuhan tidak hanya memberi perintah, tetapi juga memosisikan diri sebagai penyelamat, sehingga hukum-hukum yang disampaikan dibingkai bukan sebagai beban, melainkan sebagai respons etis atas kasih karunia. Dalam konteks ini, framing memperkuat dimensi ideologis teks dan menjadikannya sebagai instrumen pembentukan tatanan sosial dan spiritual.

Strategi *discourse representation* dalam artikel juga tampak jelas melalui bagaimana teks menghadirkan ucapan Tuhan secara langsung sebagai tindak tutur yang mengikat. Perintah-perintah dalam Dekalog bukan sekadar kutipan normatif, tetapi merupakan bentuk representasi diskursif yang performatif. Apa yang diucapkan sekaligus menciptakan realitas sosial yang baru. Misalnya, larangan-larangan seperti "Jangan membunuh" atau "Jangan mengingini" bukan hanya menyatakan nilai moral, tetapi secara linguistik mengukuhkan

norma universal tanpa pengecualian. Dalam strategi ini, wacana Tuhan tidak hanya dikutip, tetapi dihadirkan kembali dengan kekuatan naratif dan ideologis penuh, menegaskan peran bahasa dalam membangun dunia sosial umat Israel.

Melalui ketiga strategi tersebut, artikel ini berhasil menunjukkan bahwa teks Keluaran 20:1-17 bukan sekadar himpunan hukum moral, melainkan suatu konstruksi wacana yang membentuk relasi kuasa, identitas kolektif, serta tatanan etis dalam komunitas iman. Pendekatan Wodak memperlihatkan bahwa bahasa religius, khususnya dalam teks suci, memiliki fungsi ganda: sebagai alat komunikasi ilahi dan sebagai mekanisme sosial untuk membentuk kesadaran kolektif.

Intensification, mitigation

Strategi *intensification* dan *mitigation* memainkan peran penting dalam mengatur kekuatan atau kelembutan suatu pernyataan dalam teks. Keduanya berkaitan dengan bagaimana makna diperkuat atau diperlemah, dan digunakan secara sadar untuk mengarahkan interpretasi audiens terhadap pesan tertentu,

khususnya dalam konteks kekuasaan, legitimasi, dan norma sosial.

Pada Kesepuluh Firman (Keluaran 20:1-17), strategi *intensification* terlihat jelas dalam bentuk bahasa yang absolut, tidak dapat dinegosiasikan, dan sangat tegas. Sebagian besar perintah dalam teks disampaikan menggunakan struktur imperatif yang kuat tanpa subjek eksplisit, misalnya: “Jangan membunuh”, “Jangan berzinah”, “Jangan mencuri”. Ungkapan-ungkapan ini tidak memberikan ruang interpretasi atau pengecualian. Itu membentuk pernyataan normatif yang absolut. Dalam kajian wacana, bentuk seperti ini disebut *low-modality*, yakni ekspresi dengan kepastian tinggi yang mengintensifkan pesan dan memperkuat posisi pengirim wacana sebagai otoritas tertinggi.

Selain itu, penggunaan narasi historis sebagai legitimasi juga merupakan bentuk intensifikasi. Ketika Tuhan menyatakan, “Akulah TUHAN, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan,” maka seluruh perintah yang mengikutinya diperkuat dengan dasar emosional, historis, dan teologis. Ini adalah

bentuk strategi intensifikasi melalui argumentasi topos historis, yang tidak hanya memperkuat isi perintah, tetapi juga menanamkan rasa kewajiban moral dan spiritual pada audiens. Kalimat seperti “Aku adalah Allah yang cemburu” juga merupakan ekspresi intensifikasi emosional yang mempertegas eksklusivitas hubungan Tuhan dan umat-Nya.

Sebaliknya, strategi *mitigation* dalam teks ini sangat minimal, bahkan hampir tidak ditemukan secara eksplisit. Hal ini dapat dimaknai sebagai strategi retorik dalam dirinya sendiri: dengan tidak mengurangi intensitas perintah, teks menampilkan dirinya sebagai hukum mutlak dari otoritas ilahi. Namun, jika ditelusuri secara lebih dalam, ada bentuk mitigasi halus dalam perintah-perintah yang menggunakan insentif atau janji sebagai bentuk pelunakan, misalnya pada perintah kelima: “Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu.” Janji umur panjang dan keberlangsungan komunitas ini secara tidak langsung menjadi bentuk mitigasi, bukan dalam arti memperlemah isi perintah,

melainkan menawarkan insentif positif yang memperhalus tekanan hukum.

Maka baik intensification maupun mitigation dalam Dekalog digunakan secara strategis untuk menanamkan norma dan memperkuat struktur sosial keagamaan. *Intensification* mendominasi sebagai bentuk kontrol diskursif yang bersifat vertikal dan hegemonik, sementara mitigation, meskipun terbatas, hadir dalam bentuk janji-janji insentif untuk membangun ketaatan yang bersifat etis dan relasional, bukan hanya hukum semata. Kedua strategi ini memperlihatkan bagaimana bahasa dalam teks suci tidak netral, melainkan dikonstruksi untuk menanamkan kekuasaan, otoritas, dan kepatuhan dalam kerangka ideologis dan teologis umat.

Perangkat Linguistik: Analisis Kebahasaan

Keluaran 20:1-17, yang memuat Sepuluh Perintah Allah atau Dekalog, merupakan salah satu teks paling penting dalam tradisi hukum Yahudi dan Kristen. Jika dianalisis melalui kerangka Ruth Wodak, teks ini tidak hanya berfungsi sebagai

kumpulan perintah moral, tetapi juga sebagai wacana pembentukan identitas kolektif dan hegemonik di mana Tuhan sebagai figur otoritas utama mengonstruksi norma, relasi kuasa, dan sistem sosial Israel melalui strategi linguistik dan historis.

Teks dibuka dengan klausa performatif “Berfirmanlah Allah,” yang dalam teori wacana merupakan tindak ujaran otoritatif. Di sini, Allah tampil sebagai subjek gramatikal yang menyampaikan rangkaian norma, menjadikannya aktor utama dalam narasi hukum yang bersifat transenden dan mutlak. Dalam konteks sejarah, bangsa Israel baru saja keluar dari perbudakan Mesir. Sebuah pengalaman kolektif yang menyakitkan sekaligus membebaskan. Ayat kedua mengingatkan umat akan identitas mereka sebagai kaum yang dibebaskan oleh Tuhan dari tempat perbudakan. Ini bukan sekadar pengantar, melainkan strategi legitimasi: Tuhan menempatkan dirinya sebagai penyelamat, dan karena itu layak menjadi pembuat hukum. Seperti dijelaskan oleh Bosman (2014), narasi eksodus berfungsi sebagai *cultural memory*, yaitu memori yang membentuk

identitas etnis dan spiritual bangsa Israel.

Perintah pertama dan kedua menetapkan eksklusivitas mono-teisme: “Jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku” dan “Jangan membuat bagimu patung...”. Dalam konteks budaya Timur Dekat Kuno yang sangat dipengaruhi politeisme Mesir, Kanaan, dan Babel larangan ini menciptakan pemisahan ideologis. Dengan menggunakan strategi nominasi negatif, seperti “allah lain” dan “patung,” teks ini memosisikan unsur-unsur asing sebagai yang lain yang tidak sah dan harus ditolak. Ini adalah bentuk wacana pemurnian, upaya untuk membangun identitas religius yang murni dan tidak tercampur. Robert Gnuse (2023) menyebutkan bahwa redaksi awal Dekalog justru dibentuk dalam upaya menegaskan perbedaan Israel dengan bangsa sekitarnya yang cenderung sinkretik.

Perintah ketiga dan keempat membawa pembaca pada aspek simbolik dan ritmis kehidupan. Tuhan melarang penyebutan nama-Nya secara sembarangan, mencerminkan bagaimana dalam budaya Semit kuno, nama adalah simbol kekuasaan yang tidak boleh disalahgunakan. Nama

Tuhan mengandung otoritas spiritual dan kontrak sakral. Pelanggaran terhadap nama-Nya berarti pelanggaran terhadap seluruh tatanan yang Ia ciptakan. Selanjutnya, perintah untuk menguduskan hari Sabat bukan hanya pengaturan waktu ibadah, tetapi juga revolusi sosial. Di Mesir, sistem kerja tanpa hari istirahat menindas para budak. Sabat, dalam konteks pasca-eksodus, menjadi simbol pembebasan: waktu yang dikuasai Tuhan dan diberikan kembali kepada manusia sebagai ruang peristirahatan dan kesetaraan. Ronald Hendel (2015) menyebut hal ini sebagai *sacralization of time*, yaitu pengaturan waktu berdasarkan teologi penciptaan.

Perintah kelima hingga kesepuluh membentuk bagian kedua Dekalog, yang berfokus pada struktur sosial dan internal masyarakat. Dimulai dengan “Hormatilah ayahmu dan ibumu,” perintah ini menegaskan pentingnya hierarki keluarga dalam masyarakat patriarkal. Orang tua adalah otoritas yang bukan hanya pribadi, tetapi juga bagian dari sistem hukum informal. Dengan memberi janji “panjang umur di tanah yang diberikan Tuhan,” perintah ini

menciptakan insentif moral yang memperkuat struktur keluarga sebagai unit dasar keberlangsungan masyarakat. Ayat-ayat berikut yaitu larangan membunuh, berzinah, mencuri, dan bersaksi palsu menata hubungan antar anggota komunitas. Dalam masyarakat segmenter pasca-eksodus, kekerasan pribadi dapat memicu konflik antar klan. Maka, larangan membunuh menjaga stabilitas kolektif. Tidak ada objek eksplisit yang disebutkan karena sifatnya universal: setiap nyawa manusia adalah milik Tuhan.

Larangan berzinah dan mencuri mengatur dua hal mendasar dalam masyarakat agraris-patriarkal: integritas keluarga dan hak milik. Perzinahan bukan hanya persoalan moral, melainkan ancaman terhadap sistem waris dan kepemilikan laki-laki atas garis keturunan. Perempuan, dalam konstruksi sosial masa itu, disebutkan dalam konteks milik pria, bukan sebagai subjek hukum independen. Wodak menyebut strategi ini sebagai bentuk pengaburan aktor dalam diskursus dominasi patriarkal. Demikian pula, larangan mencuri tidak mendefinisikan objek karena

semuanya, dari ternak hingga hamba, memiliki nilai eksistensial dalam struktur ekonomi kuno.

Perintah terakhir “Jangan mengingini...” membawa wacana hukum ke ranah psikis. Ini satu-satunya perintah yang tidak melarang tindakan, melainkan niat batin. Dalam daftar milik yang tidak boleh diingini, istri dicantumkan bersama rumah, hamba, lembu, dan keledai, menunjukkan bahwa dalam struktur budaya saat itu, perempuan termasuk bagian dari properti pria. Namun, lebih dari sekadar patriarkalisme, perintah ini menunjukkan pengendalian terhadap hasrat manusia sebagai fondasi dari keteraturan sosial. Wacana ini membentuk norma internal melalui larangan terhadap hasrat yang bisa memicu pelanggaran eksternal.

Secara keseluruhan, struktur linguistik Dekalog didominasi oleh bentuk imperatif, subjek tersembunyi “engkau” (yang menyiratkan audiens kolektif), dan predikat yang tegas. Wacana dibangun secara vertikal dari Tuhan kepada manusia dengan otoritas absolut. Dalam pendekatan Wodak, ini menunjukkan wacana hegemonik yang menggunakan bahasa sebagai alat kuasa. Tuhan

tidak hanya berbicara sebagai legislator, tetapi juga sebagai pendidik, hakim, dan pengatur kehidupan sosial dan spiritual manusia.

Implikasi Wacana terhadap Pembentukan Identitas dan Kepatuhan Komunitas Israel

Implikasi paling fundamental dari wacana Keluaran 20 adalah pembentukan identitas kolektif Israel. Penggunaan pronomina “engkau” dalam bentuk tunggal secara diskursif menyapa seluruh komunitas sebagai satu pribadi yang utuh, yang menjalin relasi perjanjian langsung dengan YHWH. Identitas ini tidak didasarkan pada etnisitas atau teritori semata, melainkan pada pengalaman historis pembebasan dan komitmen eksklusif kepada Allah pembebas tersebut. Dengan demikian, menjadi Israel berarti menjadi bagian dari komunitas yang didefinisikan oleh relasi kovenan ini.

Wacana ini secara efektif berfungsi sebagai penanda batas (*boundary marker*) yang memisahkan Israel dari bangsa-bangsa lain. Larangan keras terhadap penyembahan ilah lain dan pembuatan patung secara langsung

mengkonstruksi sebuah identitas religius yang eksklusif dan monoteistis. Dalam konteks politeisme Timur Dekat kuno, perintah ini bukan sekadar aturan teologis, melainkan sebuah pernyataan politis dan kultural yang radikal. Identitas unik ini menjadi benteng ideologis yang mencegah asimilasi dan memperkuat kohesi sosial komunitas Israel di tengah lingkungan yang berbeda.

Kepatuhan dalam wacana ini dikonstruksikan bukan sebagai ketundukan buta, melainkan sebagai respons etis dan rasional. Dengan mendasarkan seluruh tuntutan hukum pada prolog pembebasan (ayat 2), teks ini membingkai ketaatan sebagai wujud syukur dan loyalitas terhadap Sang Pembebas. Mekanisme diskursif ini bertujuan untuk menginternalisasi norma-norma tersebut ke dalam kesadaran komunitas. Kepatuhan yang lahir dari rasa terima kasih secara inheren lebih stabil dan langgeng daripada kepatuhan yang dipaksakan melalui ancaman kekuasaan semata.

Wacana Kesepuluh Firman menanamkan memori kolektif sebagai fondasi identitas dan

kepatuhan yang berkelanjutan. Peristiwa Eksodus tidak hanya berfungsi sebagai justifikasi awal, tetapi menjadi memori yang harus terus-menerus diingat dan dihidupi melalui ketaatan pada hukum. Kepatuhan dengan demikian menjadi sebuah tindakan memorial, sebuah cara untuk mereaktualisasikan peristiwa pembebasan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memastikan bahwa identitas sebagai umat yang dibebaskan dan kewajiban untuk taat diwariskan secara efektif dari generasi ke generasi.

Secara keseluruhan, wacana ini berimplikasi pada pembentukan ideologis bagi sebuah komunitas teokratis. Identitas yang dibangun dan kepatuhan yang dituntut secara langsung melegitimasi sebuah tatanan sosial di mana hukum ilahi menjadi sumber otoritas tertinggi. Kepatuhan tidak lagi hanya urusan personal-religius, tetapi menjadi pilar utama bagi eksistensi dan keteraturan komunitas sebagai entitas sosio-politik. Karena itu, teks ini berfungsi sebagai konstitusi diskursif yang membentuk Israel menjadi bangsa yang unik secara hukum, etika, dan identitas.

Pembahasan Hasil

Kitab Keluaran memperlihatkan bagaimana Allah bertindak tidak hanya sebagai pembebas umat Israel dari penindasan Mesir, tetapi juga sebagai pemberi hukum yang menata kehidupan mereka. Dalam kerangka teologis, hal ini berarti kebebasan sejati tidak sekadar berhenti pada keluarnya Israel dari perbudakan, melainkan harus diarahkan melalui hukum yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Pembebasan menjadi dasar, sedangkan hukum menjadi penuntun agar bangsa itu dapat hidup sesuai identitas barunya sebagai umat perjanjian.

Sepuluh Firman yang berikan di Sinai menegaskan relasi eksklusif antara Tuhan dan Israel. Hubungan ini dibangun dengan sangat personal melalui sapaan “Aku” dan “engkau”, sebuah komunikasi vertikal yang menunjukkan otoritas Allah sekaligus menuntut loyalitas penuh dari umat. Relasi ini tidak netral, tetapi sarat dengan dimensi perjanjian, sehingga Dekalog tidak dapat dipahami hanya sebagai aturan moral umum, melainkan sebagai peneguhan identitas iman monoteistik yang lahir

dalam konteks pluralisme agama Timur Dekat Kuno.

Dimensi teologis lainnya tampak dalam kesucian nama dan waktu. Larangan menyebut nama Tuhan sembarangan menekankan bahwa bahasa memiliki bobot spiritual, bukan sekadar alat komunikasi biasa. Demikian juga perintah menguduskan hari Sabat memperlihatkan bagaimana waktu dipahami sebagai milik Allah yang kudus. Dalam konteks Mesir di mana budak tidak mengenal istirahat, Sabat menjadi revolusi spiritual sekaligus tanda bahwa Allah membebaskan manusia tidak hanya dari rantai fisik, tetapi juga dari sistem penindasan yang merampas kemanusiaan.

Yang menarik, perintah terakhir berbicara bukan tentang tindakan lahiriah, melainkan tentang niat batin: jangan mengingini. Di sini terlihat bahwa Allah bukan hanya menata perilaku eksternal, tetapi juga membentuk batin manusia. Secara teologis, ini berarti perjanjian dengan Allah tidak hanya menyangkut ketaatan hukum, melainkan transformasi kesadaran dan hati yang terdalam.

Jika dilihat dari sisi sosial, Kesepuluh Firman berfungsi sebagai

“konstitusi” bangsa Israel yang baru lahir. Mereka yang keluar dari Mesir belum memiliki sistem hukum yang jelas. Sepuluh Firman hadir untuk memberikan kerangka moral, politik, dan sosial yang membentuk Israel sebagai komunitas dengan identitas baru. Karena itu, hukum ini tidak hanya religius, tetapi juga fundamental bagi kehidupan bersama.

Perintah tentang Sabat memperlihatkan dampak sosial yang radikal. Dalam masyarakat agraris dan patriarkal, hak istirahat bukanlah sesuatu yang umum. Namun, hukum memastikan bahwa semua orang termasuk hamba, bahkan ternak berhak menikmati perhentian. Dengan demikian, Sabat bukan hanya ibadah, melainkan pernyataan kesetaraan dan keadilan sosial.

Keluarga juga diposisikan sebagai unit dasar masyarakat. Perintah untuk menghormati ayah dan ibu bukan sekadar sopan santun, tetapi fondasi bagi keberlangsungan tradisi iman dan stabilitas sosial Israel. Melalui keluarga, norma, hukum, dan iman diwariskan, sehingga komunitas dapat bertahan lintas generasi.

Sementara itu, larangan membunuh, mencuri, berzinah, atau bersaksi dusta merupakan aturan universal yang menjaga kohesi komunitas. Israel adalah bangsa baru dengan latar belakang pengalaman pahit di Mesir; tanpa norma yang tegas, kekerasan, perpecahan, dan konflik internal bisa dengan mudah menghancurkan komunitas itu. Karena itu, hukum-hukum ini sekaligus berfungsi sebagai pagar yang menjaga solidaritas dan rasa aman di tengah dinamika sosial mereka.

Bahasa yang digunakan dalam Kesepuluh Firman juga membentuk identitas sosial. Kata ganti “engkau” dalam bentuk tunggal seolah menyapa setiap orang, tetapi pada saat yang sama mencakup seluruh bangsa. Hal ini menegaskan bahwa Israel adalah satu tubuh kolektif yang hidup dalam perjanjian dengan Allah. Identitas kolektif ini diperkuat lagi dengan larangan menyembah dewa lain dan membuat patung, yang membedakan Israel dari bangsa-bangsa sekitar. Identitas mereka bukan ditentukan oleh wilayah atau politik semata, melainkan oleh kesetiaan kepada YHWH.

Maka Kesepuluh Firman dapat dibaca secara teologis sebagai perintah yang menata relasi Allah dan umat, serta secara sosial sebagai konstitusi yang membentuk komunitas baru dengan norma, etika, dan identitas kolektif yang khas. Teks ini memperlihatkan bahwa bahasa hukum dalam Kitab Suci bukan hanya instruksi moral, tetapi juga wacana kuasa yang membentuk kesadaran, menata kehidupan sosial, dan memberi Israel ciri khas yang membedakan mereka dari bangsa lain.

Relevansi Kontemporer

Kesepuluh Firman yang diberikan Allah kepada Israel pada zaman kuno ternyata memiliki gema yang tetap relevan bagi kehidupan etis masyarakat Indonesia masa kini. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya bersifat religius, tetapi juga menyentuh persoalan sosial, politik, dan kemanusiaan yang sedang dihadapi bangsa ini.

Pertama, Kesepuluh Firman menekankan bahwa relasi dengan Allah selalu berkaitan dengan cara manusia menata hidup bersama. Dalam konteks Indonesia yang plural

dan majemuk, penghormatan hanya kepada Allah serta larangan menyembah berhala dapat dipahami sebagai ajakan untuk menghindari segala bentuk penyembahan modern terhadap kekuasaan, uang, atau kepentingan politik yang sering kali menyingkirkan nilai kemanusiaan. Dalam bahasa kontemporer, pesan ini mengingatkan kita untuk menolak “berhala-berhala” baru berupa korupsi, materialisme, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Kedua, perintah tentang Sabat yang menekankan istirahat dan keadilan sosial menemukan relevansinya dalam situasi dunia kerja di Indonesia yang masih sering menomorduakan kesejahteraan buruh, petani, dan pekerja informal. Prinsip Sabat bisa dibaca sebagai dorongan etis untuk menciptakan keadilan struktural: setiap orang berhak atas waktu istirahat, kesehatan, dan ruang untuk menikmati hidup. Dengan demikian, etika Sabat menjadi kritik terhadap sistem kerja yang eksploitatif.

Ketiga, penghormatan terhadap orang tua menegaskan pentingnya keluarga sebagai fondasi moral bangsa. Dalam masyarakat Indonesia yang sedang mengalami disrupsi nilai

akibat globalisasi dan teknologi digital, perintah ini relevan untuk mengingatkan generasi muda akan pentingnya tradisi, penghargaan terhadap orang tua, dan kesinambungan nilai-nilai luhur.

Keempat, larangan membunuh, berzinah, mencuri, dan bersaksi dusta adalah norma universal yang terus-menerus ditantang dalam masyarakat. Tingginya angka kekerasan, maraknya kasus korupsi, ketidaksetiaan dalam relasi rumah tangga, serta penyebaran hoaks di media sosial menunjukkan betapa nilai-nilai Dekalog masih sangat aktual. Dalam konteks Indonesia, etika Firman ini menuntut adanya budaya integritas, kesetiaan, serta penghargaan terhadap kehidupan dan martabat sesama manusia.

Akhirnya, larangan “jangan mengingini” menyoroti akar persoalan etis yang sering tersembunyi: keinginan yang tidak terkendali. Dalam masyarakat yang semakin konsumtif dan terjebak pada gaya hidup hedonis, pesan ini menjadi ajakan untuk membangun budaya kesederhanaan, pengendalian diri, dan solidaritas dengan mereka yang lemah.

Kesepuluh Firman tidak hanya menjadi dokumen kuno bagi Israel, melainkan sumber etika yang dapat menolong Indonesia untuk terus membangun kehidupan bersama yang adil, beradab, dan berlandaskan nilai-nilai spiritual. Kehadiran Sepuluh Firman di tengah realitas bangsa dapat dipahami sebagai panggilan untuk menjaga integritas pribadi, membangun solidaritas sosial, dan menegakkan keadilan, sehingga iman tidak berhenti pada ranah privat, tetapi sungguh mewujud dalam kehidupan publik.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari pembahasan dapat dilihat bahwa Kesepuluh Firman (Dekalog) dalam Keluaran 20:1-17 bukan hanya sekadar kumpulan aturan moral, melainkan sebuah wacana besar yang membentuk cara pandang, iman, dan kehidupan sosial Israel. Ada beberapa hal utama yang bisa disimpulkan. Pertama, pada sisi teologis, Dekalog menampilkan Allah sebagai pembebas yang sekaligus menjadi pemberi hukum. Relasi Allah dan umat diikat melalui perjanjian yang bersifat personal, dengan sapaan

langsung “Aku” dan “engkau.” Di sini lahir identitas iman monoteistik yang menolak segala bentuk penyembahan berhala. Kedua, pada sisi sosial, Dekalog berfungsi sebagai dasar atau “konstitusi” bangsa Israel yang baru, yang menata kehidupan bersama melalui nilai keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Perintah Sabat, misalnya, menjadi tanda revolusi sosial karena memberikan hak istirahat bagi semua orang, termasuk budak dan ternak. Ketiga, pada level bahasa, pemakaian kata ganti tunggal “engkau” menegaskan dua hal sekaligus: tanggung jawab individu di hadapan Allah dan solidaritas kolektif seluruh bangsa. Keempat, secara spiritual dan etis, Kesepuluh Firman menembus lebih dalam ke ranah batin manusia. Larangan “jangan mengingini” menandakan bahwa iman Israel tidak berhenti pada tindakan lahiriah, melainkan menuntut pembaharuan hati dan pikiran.

Keunikan dari penelitian ini ada pada cara pandangnya: Kesepuluh Firman tidak hanya dibaca sebagai teks hukum atau dokumen religius, tetapi juga sebagai wacana kuasa

yang bekerja melalui bahasa untuk membentuk identitas teologis dan sosial Israel. Pendekatan ini membuka perspektif baru bahwa bahasa hukum dalam Kitab Suci punya fungsi ganda: ia mengikat iman, sekaligus menata komunitas dalam bingkai budaya dan sejarah. Dengan demikian, penelitian ini memberi kontribusi dalam memperluas pemahaman teologi biblika lewat kacamata analisis wacana kritis, di mana bahasa dipandang sebagai sarana Allah membentuk iman, etika, dan kehidupan sosial umat-Nya.

Berdasarkan temuan yang diperoleh, penelitian ini merekomendasikan beberapa arah pengembangan. Pertama, kajian teologi di Indonesia sebaiknya mulai lebih terbuka pada pendekatan interdisipliner, khususnya linguistik kritis. Selama ini teks Kitab Suci cenderung ditafsirkan hanya dalam kerangka dogmatis atau historis, padahal analisis bahasa dapat membuka jendela baru untuk melihat bagaimana kuasa wacana religius bekerja dalam membentuk iman dan identitas umat. Kedua, pendekatan Analisis Wacana Historis (AWH) yang digunakan dalam penelitian ini

dapat diperluas penggunaannya pada teks-teks lain, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dengan begitu, kita bisa melihat secara lebih menyeluruh bagaimana relasi antara bahasa, kuasa, dan identitas dibangun dalam keseluruhan wacana iman Kristen. Ketiga, temuan ini juga memiliki relevansi praktis bagi pendidikan teologi dan pengajaran di gereja. Kesadaran akan kuasa bahasa dalam Kitab Suci dapat mendorong cara pembinaan jemaat yang lebih reflektif, kritis, dan kontekstual, sehingga Firman Tuhan benar-benar hadir sebagai kekuatan yang membentuk kehidupan sehari-hari umat.

Penelitian ini bukan hanya memberi kontribusi pada kajian linguistik-teologis yang sedang berkembang, tetapi juga membuka peluang bagi penelitian lanjutan. Terutama, penelitian ini menjadi undangan untuk terus mengembangkan pemahaman iman dan bahasa dalam kerangka wacana yang lebih luas, sehingga studi Kitab Suci tidak berhenti pada tafsir normatif, melainkan mampu membongkar dinamika kuasa dan

identitas yang terkandung di dalamnya.

REFERENSI

- Ambarwati, K. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Bosman, H. (2014). The Exodus as Negotiation of Identity and Human Dignity. *Journal of Hebrew Scriptures*, 14(1). <https://doi.org/10.5508/jhs.2014.v14.14>
- Brueggemann, W. (2003). *An Introduction to the Old Testament: The Canon and Christian Imagination*. Westminster John Knox Press.
- Childs, B. S. (1976). *The book of Exodus: A critical, theological commentary* (3. print). Westminster, John Knox Press.
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Longman.
- Gnuse, R. K. (2023). Deuteronomistic Redaction and the Evolution of the Decalogues. *Theological Studies Journal*, 84(1), 20–39.
- Hendel, R. (2015). The Exodus as Cultural Memory: Egyptian Bondage and the Song of the Sea. *Ancient Israel Seminar Series*, 3(1), 44–62.

- Lembaga Alkitab Indonesia. (2002). *Alkitab Terjemahan Baru*. Lembaga Alkitab Indonesia.
- Li, X. (2025). A Review of Discourse-Historical Analysis. *Modern Linguistics*, 13(1).
<https://doi.org/10.12677/ml.2025.131018>
- Maranatha, C. A. (2024). Penafsiran Alkitab yang Dinamis: Integrasi Konteks Iman, Sejarah, Sastra, dan Sosial. *RERUM Journal of Biblical Practice*, 4(2).
<https://doi.org/10.55076/rerum.v4i2.339>
- Nasution, Z. (2007). Bahasa sebagai Alat Komunikasi Politik dalam Rangka Mempertahankan Kekuasaan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(3).
<https://doi.org/10.22500/sodality.v1i3.5897>
- Reisigl, M., & Wodak, R. (2001). *Discourse and Discrimination: Rhetorics of Racism and Antisemitism*. Routledge.
- Reisigl, M., & Wodak, R. (2009). The Discourse-Historical Approach. In R. Wodak & M. Meyer (Eds.), *Methods of Critical Discourse Analysis* (2nd ed., pp. 87–121). SAGE Publications.
- Subakti, H., Hurit, R., Eni, G., Yufrinalis, M., Maria, S., Adwiah, R., Syamil, A., Mbari, M., Putra, S., Solapari, N., Musriati, T., & Putra, A. P. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- van Dijk, T. A. (1998). *Ideology: A Multidisciplinary Approach*. SAGE.
- Wodak, R. (2015a). *Critical Discourse Analysis, Discourse-Historical Approach* (p. 14pp).
<https://doi.org/10.4135/9780857028020.d6>
- Wodak, R. (2015b). *Methods of Critical Discourse Studies, 3rd edition*.
- Wodak, R., & Meyer, M. (Eds.). (2009). *Methods of Critical Discourse Analysis* (2nd ed.). SAGE.
- Zhumagulov, A., Zhakulayev, A., Nygmetova, N., Akhtaeva, N. S., Khuatbekuly, Y., Tleubekova, B., Zharylgapov, Z., & Kalybekova, K. (2025). Historical Discourse: Artistic Text and Historical Consciousness in the Post-Colonial Period. *Forum for Linguistic Studies*, 7(1).
<https://doi.org/10.30564/fls.v7i1.7830>